



PBJ

BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 666 /438.1.1.3/2021

TENTANG
TIM PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA
DAN SEKRETARIAT TIM PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KONTRAK
PENGADAAN BARANG/ JASA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh hasil pengadaan barang/ jasa yang sesuai dengan kebutuhan, maka pelaksanaan pekerjaan yang harus sesuai dengan kontrak pengadaan barang/jasa yang telah disepakati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Tim Pendampingan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Sekretariat Tim Pendampingan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pendampingan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa dan Sekretariat Tim Pendampingan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan pendampingan terkait pelaksanaan kontrak mulai dari revidi laporan hasil pemilihan penyedia, penetapan SPPBJ, persiapan penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan;
 - b. memberikan pendampingan dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim Pendampingan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa dapat mengundang pakar/ ahli/ pengamat/ saksi/ pelaku pengadaan/ Aparat Penegak Hukum dan/ atau Perangkat Daerah terkait sebagai narasumber, dan diberikan honorarium sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Penanggung Jawab, sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Ketua, sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. Wakil Ketua, masing-masing sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Sekretaris, masing-masing sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Anggota, masing-masing sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
- atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga, Tim dibantu oleh Sekretariat Tim Pendampingan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang berkedudukan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH** : Rincian tugas Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud diktum keenam adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan dan administrasi keuangan penyelenggaraan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa;
 - b. menerima permohonan/permintaan konsultasi dan/atau pendampingan terkait pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa;

- c. memilah dan mengklasifikasi permohonan/permintaan/konsultasi/pendampingan sebagaimana dimaksud pada huruf b berdasarkan jenis, urgensi dan kompleksitas pekerjaannya;
- d. merekam, mencatat, mendokumentasikan dan melaporkan hasil pendampingan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa;
- e. melaksanakan tugas lain dari Ketua/ Wakil Ketua Tim pendampingan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketujuh kepada Sekretariat Tim diberikan honorarium per bulan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketua, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Anggota, masing-masing sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah),

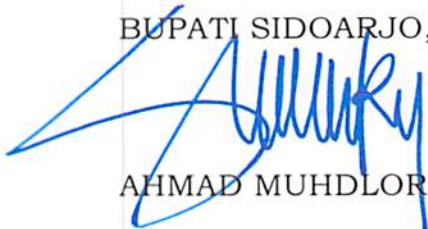
atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Membebankan honorarium sebagaimana dimaksud diktum kelima dan kedelapan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 666 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 19 November 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Sidoarjo	Pengarah I
2	Wakil Bupati Sidoarjo	Pengarah II
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo	Penanggung Jawab
4	Inspektur Kabupaten Sidoarjo	Ketua
5	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	Wakil Ketua I
6	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	Wakil Ketua II
7	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	Wakil Ketua III
8	Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	Sekretaris I
9	Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	Sekretaris III
10	1 (satu) orang dari unsur Kejaksaan Negeri Sidoarjo	Anggota
11	1 (satu) orang dari unsur Kepolisian Resort Kota Sidoarjo	Anggota
12	1 (satu) orang dari Unsur Bagian Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	Anggota

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ ~~666~~ /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 19 November 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT TIM PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KONTRAK
PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kasubbag Pengelolaan LPSE Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	Ketua
2	9 (sembilan) orang dari Unsur Bagian Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	Anggota

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR